



News Title : Investor Aset Kripto Disarankan Gunakan Exchange yang Terdaftar di Bappebti

Media Name : kontan.co.id

Journalist : Aris Nurjani

Publish Date : 23 May 2022

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 0

Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti), Nailul Huda (Peneliti INDEF)

Ads Value : 0

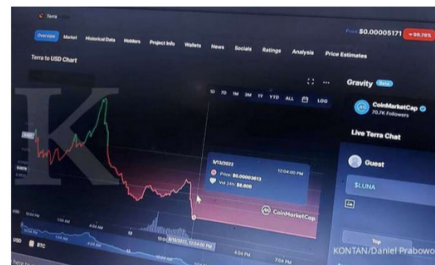
Section/Rubrication : Investasi

Topic :

INVESTASI / ASET KRIPTO

Investor Aset Kripto Disarankan Gunakan Exchange yang Terdaftar di Bappebti

Senin, 23 Mei 2022 / 13:55 WIB



ILLUSTRASI: Pemerintah memonitoran transaksi kripto dilaksanakan oleh pedagang aset atau exchange tak terafiliasi dengan tarif pajak yang tinggi.

INSIGHT INVESTASI KEUANGAN INDUSTRI NASIONAL INTERNASIONAL PERSONAL FINANCE

terhadap perdagangan aset kripto, pemerintah membolehkan transaksi dilaksanakan oleh pedagang aset atau exchange tak berizin. Tetapi pemerintah menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi.

Aturan itu diatur dalam PMK No. 68/2022 tentang PPN dan PPh aset kripto. Melalui aturan tersebut, pemerintah mengatur pengenaan pajak terhadap aset kripto sebagai barang kena pajak tak berwujud.

Terdapat tiga bentuk penyerahan aset kripto yang menjadi sasaran pajak, yaitu pembelian aset kripto dengan mata uang fiat, tukar menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya atau swap, dan tukar menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto atau jasa.

Baca Juga: Harga Bitcoin Tembus US\$ 30.000, Masih di Pasar Bearish Tanpa Akhir yang Terlihat

Selain itu, peraturan tersebut memberikan keleluasaan transaksi yang bisa dilakukan melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) yang tidak terdaftar maupun Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang terdaftar di Bappebti.

Tarif PPN bagi PFAK terdaftar sebesar 0,11% dikali nilai aset kripto, serta PPh 22 final sebesar 0,1%. Sebaliknya, untuk exchange yang tak terdaftar besaran tarif menjadi dua kali lipat.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kementerian Perdagangan Tirta Karma Senjaya menilai para investor kripto lebih baik memilih para pedagang aset kripto yang terdaftar. Tidak saja karena besaran pajak yang berbeda, tetapi karena keamanan yang dijaga oleh pemerintah.

Baca Juga: Duit Orang Kaya Sudah Menguas US\$ 5 Triliun

"Lebih aman berinvestasi transaksi di pedagang dalam negeri yang terdaftar di Bappebti karena jelas badan hukumnya dan rekeningnya ada di dalam negeri dan menggunakan fiat rupiah," jelas Tirta.

Senada, Kepala Sub Direktorat PPM Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Kemenkeu Bonarsius Sipayung juga menyarankan hal serupa. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) netral, menurutnya, masyarakat sebaiknya memilih exchange terdaftar.

"Kalau tidak mau diatur, kena tarif lebih tinggi. Kami harus selaras dengan Kamendag, yang ada di sistem kementerian itu kita dukung dengan tarif yang lebih rendah," jelasnya sewaktu media briefing secara daring beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Stablecoin Berbasis Uang Fiat Jadi Pilihan Paling Optimal

MENGHINDARI SCAM

Dennis Adhiswara, pegiat kripto mengungkapkan pengalamannya terkait investasi yang telah lama dilakukannya. Dia menyarankan agar investor sebisa mungkin menggunakan exchange terdaftar.

"Masalahnya adalah di luar sana masih banyak project kripto yang secara fundamental meragukan, dan bahkan ada sebagian juga yang terindikasi scam," ungkap dia.

Dengan menggunakan PFAK terdaftar, investor menjadi lebih terlindungi. "Karena ketika kita belanja kripto sendiri tanpa ada exchange yang regulated, maka saya harus menghabiskan waktu lama untuk riset satu persatu koin. Untungnya di exchange yang teregulasi ini sudah memfilter dan menyaring koin-koin dan token yang sudah comply dan bebas scam," ujar dia.

Baca Juga: Investasi Aset Kripto Dinilai Bisa Jadi Sarana Pengembangan Ekonomi Anak Muda

Secara terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menjelaskan pentingnya menggunakan PFAK terdaftar. Karena pengawasan pada PFAK terdaftar dilakukan secara berlapis, dari perusahaan hingga Bappebti.

"Jika terjadi fraud akan mudah, karena ada dasar hukum yang kuat akan transaksi kita. Jika di luar exchange Bappebti maka akan susah jika terjadi fraud," terang dia.